

**POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM
MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI TIMUR TENGAH
(Studi Kasus Nuklir Iran)**

Melaty Anggraini.,S.Hut.,M.A

*Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Melaty611@gmail.com*

Abstrak

Pengayaan nuklir Iran menimbulkan sikap ancaman bagi Negara lainnya termasuk Amerika Serikat sebagai Negara super power, berakhirnya kerjasama antara AS dan Iran dalam pengembangan nuklir Iran dikarenakan revolusi Islam dan berganti periode kepemimpinan menimbulkan sikap defensive bagi Amerika Serikat apalagi dengan munculnya serangan terorisme 11 september, semakin meyakinkan AS untuk mengubah arah kebijakan politik luar negerinya berfokus ke wilayah Asia Timur. Menggunakan metode dan konsep hegemonic strategic dan power defense, penulis mencoba menganalisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya pada kasus nuklir Iran, untuk menganalisa strategi kebijakan AS dalam menghadapi nuklir Iran

Kata Kunci: Nuklir Iran, Amerika Serikat, Konsep Power Defense.

ABSTRACT

Iran Nuclear enrichment poses a threat to other countries including United States as a Super Power Country, the end of cooperation Iran-US Nuclear caused islam revolution and position change of leadership period led to a defensive act from United States, specifictly emergence issue of 9/11 September. That's made US for changing Foreign Policy more focus in the Middle East. Using hegemonic strategic method and concept power defense, writer try to analyze US foreign Policy in Middle East. Especially in Iran Nuclear, for evaluate what is strategic foreign policy US for facing Iran Nuclear.

Keywords: Iran Nuclear, US, Power Defense Concept.

A. PENDAHULUAN

Iran merupakan salah satu Negara yang terbilang cukup lama dalam mengembangkan Energi Nuklir. Aktivitas nuklir di Iran dimulai pada tahun 1957, dimana Amerika Serikat bekerjasama dengan Iran dalam meluncurkan program nuklir dalam kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat. Terbukti dengan adanya perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat yaitu Iran menandatangani *nuclear cooperation agreement* pada tahun 1957 dan mulai berlaku pada tahun 1959. Kegiatan kerjasama diawali dengan pembangunan sebuah fasilitas nuklir, yang pertama kali dibangun di Tehran yaitu “*nuclear research center*” pada tahun 1967 di kampus Tehran University dan dilaksanakan oleh *atomic organization of Iran* dengan kapasitas 5 megawatt reaktor nuklir yang dikirim langsung oleh Amerika pada tahun 1967.

Pada tahun 1968 Iran menandatangani traktat non-proleferasi nuklir (NPT) dan mulai diberlakukan pada 5 maret 1970, isi traktat tersebut menjelaskan bahwa Iran memiliki hak penuh untuk mengembangkan nuklir untuk penelitian, memproduksi dan menggunakan nuklir untuk tujuan baik tanpa adanya diskriminasi. Namun pasca digulingkannya Shah Pahlevi pada Revolusi Islam tahun 1979, Amerika Serikat berhenti menjalin kerjasama guna mendukung pengembangan nuklir di Iran, akan tetapi Iran masih tetap mengembangkannya. Setelah Revolusi Islam, Iran konsisten mengembangkan nuklir dan menyatakan bahwa pengembangan nuklir tersebut hanya untuk dijadikan tenaga pembangkit listrik, namun hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Amerika Serikat karena agen rahasia Amerika Serikat (CIA) terbukti menemukan pabrik uranium yang berkadar tinggi di Natanz, Iran.

Pernyataan Badan energi atom internasional atau IAEA semakin membuat Amerika Serikat meyakini bahwa pengembangan nuklir di Iran

bertujuan untuk membuat tenaga pemusnah massal atau WMD (*weapon of mass destruction*) dan menimbulkan opini public masyarakat internasional bahwa. Terlebih lagi dengan adanya kerjasama antara Iran dan Rusia dalam pengembangan nuklir di teluk bushehr dan ancaman penyerangan rudal ke Israel yang merupakan sekutu Amerika Serikat membuat Amerika semakin terancam dengan kegiatan upaya perkembangan nuklir di Iran. Pengembangan nuklir di Iran dianggap menjadi salah satu bentuk ancaman keamanan bagi Amerika Serikat yang membuat Amerika mulai mengambil sikap defensive untuk kegiatan pengayaan nuklir di Iran. Dengan dalih membantu mengamankan stabilitas keamanan di wilayah Timur Tengah, Amerika Serikat mulai mengeluarkan kebijakan luar negerinya yang lebih mengarah untuk menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah dengan tujuan utamanya upaya preventive pencegahan nuklir di Iran.

1. Bagaimana Program Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Wilayah Timur Tengah?
2. Bagaimana bentuk Strategi Amerika Serikat dalam menghadapi kasus nuklir Iran.

B. Tinjauan Pustaka

a. Power Defense (Strategic Deterrence, Military Defense, and Compliance)

Konsep defense merupakan konsep general, dimana secara naluriah setiap Negara akan mempertahankan kedaulatannya meskipun tidak terjadi konflik ataupun sedang terjadi konflik. Defense diartikan juga sebagai bentuk upaya negara atau aktor untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh, menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya dari negara lain, serta mengurangi kemampuan pihak musuh untuk menghancurkan atau menguasai sesuatu dari pihak *defender*. Tujuan utama dari defense adalah untuk

melawan pihak musuh atau penyerang demi meminimalkan kerugian setelah proses *deterrence* mengalami kegagalan.¹

Defense intinya dilakukan oleh suatu negara untuk mencegah agar negara lain tidak memiliki *power* yang seimbang atau bahkan melebihi *power* yang dimilikinya, dengan cara menaikkan *power* negaranya. Kekhawatiran ini akan berujung pada munculnya ketakutan akan kebangkitan lawan sebagai suatu negara hegemon yang dapat mengalahkan hegemoni negaranya. Perbedaan yang dapat dilihat antara *deterrence* dan *defense* adalah saat dimana sebuah negara sadar terhadap power yang dimiliki oleh negara lain, *deterrence* yaitu saat mereka sadar bahwa *power* lawan akan menjadi sebuah kekuatan baru yang mengancam mereka sehingga terjadi pencegahan terhadap terjadinya hal itu dan *defense* saat sebuah negara sadar bahwa power lawan telah mengancam mereka sehingga yang dilakukan adalah mencegah power tersebut bertambah besar.²

Dalam sebuah konsep strategi, *deterrence* selalu kontras dengan *defense*. *Deterrence* dan *defense* lebih fokus kepada kemampuan militer. Konsep *deterrence* secara umum adalah strategi defensif yang dikembangkan setelah Perang Dunia I dan digunakan selama Perang Dingin. Hal ini terutama relevan berkaitan dengan penggunaan senjata nuklir, dan juga terkait dengan War on Terrorism.³

Menurut Robert Jervis, teori *deterrence* atau pencegahan adalah sebuah teori yang muncul pada masa Perang Dingin dan dapat menjelaskan fenomena

¹ Baylis, John & dkk. 2002. *Strategy in the Contemporary World*. Oxford University Press. Hal 161-170

² Agustiana, Dimas & dkk. 2014. PENGGUNAAN USE OF FORCE: PENERAPAN KONSEP DETERRENCE OLEH SUATU AKTOR HUBUNGAN INTERNASIONAL DILIHAT DARI JENISNYA *PRIMARY DETERRENCE* DAN *EXTENDED DETERRENCE*. Hal 5

³ Baylis, John & dkk. 2002. *Strategy in the Contemporary World*. Oxford University Press. Hal 161-170

yang terjadi pada masa tersebut. Di dalam teori ini, aktor berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatannya untuk menangkal serangan dari lawan, atau setidaknya menekan dan memaksa lawan untuk berpikir kembali untuk melakukan serangan. Teori penangkalan dimanifestasikan kedalam sebuah strategi militer yang juga bertujuan untuk menangkal serangan negara lain atau pihak musuh dengan meningkatkan kemampuan militer baik fisik seperti alat utama sistem pertahanan (alutsista) maupun non fisik seperti doktrin militer. Tujuan dari penggunaan militer tersebut agar pihak lawan sadar akan resiko yang mereka hadapi apabila melakukan serangan. Contohnya adalah penggunaan strategi senjata nuklir Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan oleh Amerika Serikat dengan meningkatkan jumlah senjata nuklir mereka dalam skala yang besar untuk melawan senjata nuklir yang dimiliki Uni Soviet pada saat perang dingin antara kedua negara superpower ini. Sebaliknya pun begitu, selama perang dingin Uni Soviet lebih mendekat ke arah strategi pelebaran pencegahan dalam menghadapi Amerika Serikat. Tidak hanya menempatkan pasukan di pusat pemerintahan Uni Soviet saja, tapi Uni Soviet juga berusaha melakukan pencegahan diseluruh wilayah Uni Soviet dari ancaman nuklir Amerika Serikat.⁴

Deterrence juga bisa diartikan sebagai bentuk penolakan untuk mempercayai pihak lain dengan asumsi pihak lain tersebut justru akan memberikan kerugian yang lebih besar. Sarana yang dipergunakan untuk menjalankan kebijakan deterrence bisa berupa penggunaan senjata pemusnah massal (WMDs), kekuatan senjata konvensional, peningkatan kapabilitas militer secara umum, membentuk aliansi, sanksi ekonomi atau embargo, dan ancaman melakukan pembalasan. Dalam pandangan lain, deterrence juga

⁴ Agustiana, Dimas & dkk. 2014. PENGGUNAAN USE OF FORCE: PENERAPAN KONSEP DETERRENCE OLEH SUATU AKTOR HUBUNGAN INTERNASIONAL DILIHAT DARI JENISNYA *PRIMARY DETERRENCE* DAN *EXTENDED DETERRENCE*. Hal 7-8

diartikan sebagai dialektika yang digunakan oleh Griffiths dan O'Callaghan "Do not attack me because if you do, something unacceptably horrible will happen to you" atau dapat diartikan sebagai "jangan menyerang saya, atau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepadamu."⁵ tujuan utama dijalankan strategi ini untuk mencegah potensi Negara lain menjadi Negara super power baru, maksudnya dari upaya strategi yang dilakukan dapat mencegah keikutsertaan dari Negara lain untuk menjadi Negara tandingan dan dapat mengatasi ancaman yang didapat dari Negara lain. Strategi ini merupakan sebuah strategi perlindungan.

Konsep yang sejalan dengan kedua konsep diatas adalah konsep *compellence*, yaitu konsep dimana diartikan sebagai bentuk usaha persuasif dalam level yang cenderung koersif suatu negara untuk memaksa negara lawan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal yang menjadi kepentingan pihak pemberi *compellence*. *Compellence* adalah tindakan penggunaan kekuatan secara besar-besaran dengan maksud untuk memaksa lawan agar melakukan sesuatu atau menghentikan suatu tindakan yang sudah sedang dijalankan. *Compellence* ini dilakukan manakala *deterrence* sudah gagal. Dapat dikatakan bahwa konsep *compellence* ini adalah ranah yang dikuasai oleh negar-negara super power, dalam arti hanya negara-negara kuat yang mampu meng-compel negara-negara yang memiliki power di bawah mereka. Konsep ini juga memasukkan hitungan matematis dalam aplikasinya, karena jika suatu negara akan meng-compel negara lain maka harus diklasifikasikan dulu dimana letak hierarki power negara lawan dibanding negaranya. Dari konsep *deterrence* dan *compellence* ini kemudian muncul suatu konsep perilaku yang disebut *compliance*. Secara harfiah *compliance* berarti pemenuhan.

⁵ Agustiana, Dimas & dkk. 2014. PENGGUNAAN USE OF FORCE: PENERAPAN KONSEP DETERRENCE OLEH SUATU AKTOR HUBUNGAN INTERNASIONAL DILIHAT DARI JENISNYA *PRIMARY DETERRENCE* DAN *EXTENDED DETERRENCE*. Hal 10

Pemenuhan disini berarti keadaan dimana suatu negara patuh dan mau melaksanakan kepentingan dari negara yang meng-compelnya maka keadaa tersebut dinamakan compliance.⁶

b. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Kebijakan Luar Negeri suatu negara merupakan cerminan dari kepentingan nasional negaranya, termasuk juga negara Amerika Serikat. Segala tindakan Amerika Serikat ini tercermin dari serangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait kompetisi ekonomi, memperkuat pertahanan di perbatasan negara-negara, mewujudkan perdamaian, kebebasan, dan upaya perluasan ideologi demokrasi. Namun pada dasarnya politik luar negeri tidak pernah pernah bersifat tetap, politik luar negeri harus merespon dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam hubungan internasional. Secara umum berbagai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di tujuan nasionalnya yaitu memantapkan diri di dunia sebagai polisi dunia, dominasi sumber daya alam, orientasi ekonomi, penyebaran ideologi liberalism dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terrorisme, dan mewujudkan tatanan dunia baru.⁷

Dalam format politik internasional Amerika Serikat terdapat dua pilar paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara adidaya itu adalah demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia. Ciri utama politik luar negeri AS sejak tahun 1940-an hingga kini dibentuk oleh dua

⁶ Ibid

⁷ https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37137641/PGAS.docx?response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DPolitik_Global_Amerika_Serikat.docx&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190820%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190820T181400Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ce7e00320a1bb733dd2bf6de60fd7d338c769a4f9190e427b32fc2e411e1f073, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 2.37

tradisi besar dalam ilmu hubungan internasional, yaitu realisme politik dan idealisme politik. Tradisi realisme politik berkembang di era Perang Dingin, dimana tujuan utamanya dimaksudkan untuk melakukan politik pembendungan terhadap Uni Soviet yang dinilai membahayakan supremasi kekuasaan AS didunia. Sementara itu, tradisi idealisme politik berkembang di era pasca-Perang Dingin, dimana tujuan utama politik luar negeri AS diarahkan untuk melakukan ekspansi kebebasan/ demokrasi ke seluruh penjuru dunia.⁸

Menurut H.J.Morgenthau kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, di mana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional serupa dengan ‘konsep umum’ konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal yaitu kesejahteraan umum (general welfare) dan hak perlindungan hukum. Konsep tersebut memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri, tetapi di luar arti minimum konsep tersebut bisa diartikan dengan berbagai macam hal yang secara logis berpadanan dengannya sesuai dengan tradisi politik dan konteks kultural keseluruhan di mana suatu negara memutuskan politik luar negerinya. Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional sebuah negara adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain.⁹

c. Hegemoni strategic

⁸ Ibid hal 14

⁹ Mas'oed, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.

Teori hegemoni merupakan sebuah bentuk dominasi atau tindakan menekan suatu elemen tertentu yang ada dalam sebuah sistem. Joseph S. Nye berpendapat bahwa sebuah negara superior menjadi hegemon dengan melakukan tindakan persuasif agar negara lain mau berkerjasama. Persuasi dilakukan dengan menggunakan “*Soft Power*” untuk menyakinkan negara lain adanya kesamaan kepentingan (*Common Interest*). Namun menurut Robert O Keohane, negara-negara adidaya memperoleh posisi mereka secara unilateral dengan menggunakan *Hard Power* namun tetap dengan meminta persetujuan yang meyakinkan (Joseph S Nye, 1997:195). Hegemoni menciptakan atau mempertahankan rezim kritis untuk bekerjasama dimasa depan, dan mengurangi hal-hal yang tidak pasti yang dapat merugikan, sementara negara-negara lain mengejar kepentingan mereka masing-masing.

Dalam hegemoni terdapat beberapa elemen sumber kekuasaan. Pencetus konsep “*soft power*” Joseph S. Nye membuat daftar sumber kekuatan hegemonik sebagai berikut: Technological leadership, Supremacy in military and economy, Soft power, Control of the connection points of international communication lines.

Menurut Nye, negara harus mengembangkan beberapa kapasitas dibawah ini untuk memiliki soft power di era informasi, yaitu :

1. Budaya dan ide-ide yang memiliki kemiripan dengan norma-norma global (seperti liberalisme, pluralisme, otonomi)
2. Agenda komunikasi global yang memiliki pengaruh
3. *Global prestige with own domestic and international performance.*

Berdasarkan pemahaman diatas hegemoni dalam kaitannya dengan perpolitikan antar negara dapat diartikan sebagai kemampuan negara A untuk (*power to*) mengubah tindakan negara B atau kekuasaan atas (*power over*)

suatu negara untuk mengintegrasikan kepentingan negara A atau memaksakan ideologinya terhadap negara B agar sama dengan kepentingan dan kehendak negara A baik dengan berbagai tindakan seperti persuasif, perjanjian, kerjasama, tekanan ekonomi-politik, berbagai bentuk *soft power* ataupun *hard power*.

Amerika sebagai negara super power yang memiliki kepentingan di Timur tengah tentu saja merasa terancam dengan adanya nuklir di Iran yang semakin berkembang pesat dan hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat dan sekutunya sehingga Amerika menjalankan hegemoninya dengan melakukan tindakan seperti persuasif, perjanjian, kerjasama, tekanan ekonomi-politik, berbagai bentuk *soft power* ataupun *hard power* dengan menggunakan teori hegemoni.

C. PEMBAHASAN

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah

Ideology utama politik luar negeri AS sejak revolusi kemerdekaan Amerika Serikat adalah kebijakannya selalu dipengaruhi oleh dua perspektif besar ilmu Hubungan Internasional, yaitu realisme politik dan idealisme politik. Ideologi realisme politik berkembang pada masa Perang Dingin, dimana tujuan utamanya dimaksudkan untuk melakukan politik pembendungan terhadap Uni Soviet yang dinilai membahayakan supremasi kekuasaan AS didunia atau lebih dikenal dengan *Containment Policy*. Sedangkan, ideology idealisme politik berkembang mulai berkembang di era pasca-Perang Dingin, yang lebih mengutamakan bagaimana melakukan ekspansi kebebasan/ demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Sampai sekarang dua ideology besar tersebut masih mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat meskipun sudah beberapa kali ganti periode

kepemimpinan namun masih berpengaruh besar untuk setiap pengambilan kebijakan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam upaya memenuhi kepentingan ideologinya, hal yang dilakukan AS adalah menyebarkan ke seluruh dunia paham demokrasi dengan melakukan upaya diplomasi koersif khususnya ke Negara-negara yang belum menganut paham demokrasi. Karena nantinya AS akan kesulitan untuk menanamkan internasionalisasi ideologi kapitalisme sebagai asas interaksi dan UU internasional. Seperti yang telah dijelaskan diplomasi koersif lebih mengarah ke upaya untuk mengubah sikap atau keputusan pihak lawan dengan cara ancaman, sanksi, dan pemutusan atau pembatalan kerjasama. AS sebisa mungkin kerjasama ke semua Negara untuk menanamkan nilai-nilai kapitalisnya dengan menghegemoni Negara lainnya.

Diplomasi koersif yang dilakukan AS ini membawa ke zona abu-abu yang membuat posisi AS masih dipertanyakan apabila melakukan pola hubungan ke Negara lainnya. Kita bisa ambil contoh kasus AS dengan Iran, saat kepemimpinan Ahmadinejad, AS melalui dewan keamanan PBB sangat keras untuk menghentikan dengan melakukan embargo ekonomi, Iran dianggap melakukan pengembangan nuklir yang melanggar perjanjian NPT. Namun ketika Iran berganti kepemimpinan, AS dan sekutunya mencabut embargo ekonomi tersebut dan mulai menjalin hubungan dengan Iran kembali. Bisa dilihat disini AS menggunakan system organisasi internasional seperti PBB dan piagam PBB, serta NATO untuk menjadi dasar legitimasi dan alat kepentingan Internasional Sebagai pembentuk badan internasional itu, AS tentu harus mendapat jaminan, bahwa kepentingan-kepentingannya tetap bisa terjamin. Dan atas nama persamaan Hak Asasi Manusia, yang dilegalkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*) tahun 1948, AS sering melakukan intervensi dengan dalih kemanusiaan ke Negara-negara yang dianggap belum menganut paham demokrasi dan melanggar kemanusiaan. Hal tersebut sangat dibutuhkan AS agar setiap

tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk memenuhi kepentingan nasional (*national interest*) AS semata.

Dan fokus Amerika Serikat dalam menyebarkan paham demokrasinya lebih ke daerah Timur Tengah dan Asia Pasific yang dianggap, masih jauh dari paham demokrasi dan belum memiliki persamaan terhadap hak asasi manusia. Apalagi setelah dipicu terjadinya tragedy 11 September 2001 yang membuat pemerintahan AS semakin yakin perlunya melakukan upaya preventif melalui konsep *power defense* untuk kepentingan negaranya. Dan tujuannya adalah wilayah Timur tengah, dengan isu yang berkembang yaitu terorisme. AS tidak menyangka dari tragedy tersebut otak di belakangnya adalah Negara lemah seperti Afganistan, yang tidak masuk dalam hitungan Negara yang berpotensi ancaman besar. Untuk itu fokus politik luar negeri AS lebih mengarah memperkuat hubungan kerjasama dengan wilayah Timur Tengah, terutama setiap negara yang masuk dalam kategori *weak states* dan belum menganut paham demokrasi. AS mulai melakukan reformasi strategi keamanan negara serta maksimalisasi setiap kekuatan yang dimiliki. Kekuatan militer, pertahanan nasional, penegakan hukum, intelejen, dan upaya-upaya untuk mematahkan jalan dari pembiayaan operasi terorisme merupakan sebuah kesatuan yang harus dilakukan. Dimulai dari Afghanistan, Irak, Iran, sampai sudan, As mulai menjalankan diplomasi koersifnya dikarenakan peristiwa 9/ 11 telah memberikan guncangan besar bagi AS, sehingga perhatian AS akan keamanan negara (*homeland security*) secara total mengalami penyesuaian.

Arah dan warna kebijakan AS memperlihatkan perubahan yang cukup menyolok. Peristiwa 11 September tersebut terbukti memiliki peranan yang besar dalam mengubah kepentingan dan tujuan politik luar negeri AS. Setidaknya seperti apa yang terlihat dalam *Quadrennial Defense Review Report 2001* (QDR) yang dikeluarkan *Department of Defense* (Departemen Pertahanan AS) pada akhir September 2001 menunjukkan perubahan orientasi yang besar dalam tujuan-tujuan

kebijakan pertahanan. Ada empat kebijakan (*defense policy goals*) yang tercatat dalam laporan tersebut:¹⁰

- Menjaga teman dan aliansi
- Kompetisi militer ke depan yang pasif
- Mencari ancaman dan serangan terhadap kepentingan AS
- Jika kebijakan penangkalan gagal, maka musuh akan menang

Dari pengalaman 11/ 9 dan ditambah dengan pengalaman dalam perang Afganistan yang lalu, pada akhirnya orientasi kebijakan AS lebih mengedepankan ke wilayah Timur Tengah. Pada periode kepemimpinan Bush, Timur Tengah menjadi fokus kebijakan politik luar negerinya yaitu “mengkampanyekan demokrasi”, namun lebih mengedepankan jalan metode unilateralisme dan militarisme yang didasarkan pada penyederhanaan persepsi wilayah, namun upaya tersebut malah menimbulkan sebaliknya, upaya “*democratization domino effect*” malah tidak terjadi, permasalahan otoritarianisme dan ideology radikal semakin mencuat yang membuat banyak gerakan anti amerika. Metode tersebut dianggap gagal, dan telah menurunkan legitimasi AS karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang disebarkan AS.

Periode pemerintahan Bush dianggap terlalu unilateralisme dan ketergantungan pada solusi militer sehingga melanggar hak-hak demokrasi, untuk itu pada periode pemerintahan selanjutnya, Obama mencoba memperbaiki dengan pendekatan yang lebih universalis selaras dengan nilai moralitas dalam mempromosikan demokrasi di Timur Tengah. Obama menghentikan serangan militer dan intervensi ke daerah

¹⁰ https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37137641/PGAS.docx?response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DPolitik+Global+Amerika+Serikat.docx&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190820%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190820T181400Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ce7e00320a1bb733dd2bf6de60fd7d338c769a4f9190e427b32fc2e411e1f073, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 2.37

konflik Timur Tengah, dan Obama tidak menuntut untuk mengubah Negara-negara yang berkonflik tersebut menjadi Negara demokratis, fokus Obama hanya di menjalin ekonomi perdagangan di wilayah Timur Tengah dan menghancurkan Al-Qaidah yang di anggap terror bagi AS. Meskipun masih banyak yang menganggap politik luar negeri Obama “Smart Power” memiliki kemiripan dengan kebijakan luar negeri pada periode Bush. Mungkin karena nilai-nilai demokrasi AS dan kepentingannya selalu terkait per-periode pemerintahan. Nilai tersebut adalah nilai kebebasan, yang Wilson artikulasikan “kebebasan untuk semua” dalam pidatonya yang terkenal, ia menyatakan bahwa setiap prospek perdamaian di masa depan antara bangsa harus berdiri pada prinsip keadilan bagi seluruh manusia dan bangsa, hak untuk hidup, menikmati kebebasan dan keamanan antara satu dengan lainnya. Untuk menjamin hal tersebut maka AS perlu menjelma menjadi salah satu kekuatan yang paling besar di dunia untuk menjalankan kebajikannya. Dalam melindungi prinsip dan nilai kebebasan yang diyakini oleh AS, maka pemerintah AS harus bersedia menjadi *benevolent hegemon* dalam sistem dunia, bersedia menanggung beban, menjalani kesulitan, demi menjalin keberlangsungan hidup dalam kebebasan. Periodisasi kepemimpinan AS, baik dari partai demokrat maupun republik, mencatat sejarah bahwa keutamaan nilai-nilai dan moralitas AS merupakan karakteristik mendasar dari kebijakan luar negeri. Oleh karena itu atas nama tujuan niat baik, metode unilateralisme diperbolehkan apabila diperlukan untuk tindakan pencegahan salah satunya dengan konsep *power defense* yang didalamnya dijalankan diplomasi koersif. Kebijakan tersebut lebih dikenal sebagai kebijakan luar negeri neokonservatisme.

A. Kerjasama Nuklir Iran - Amerika

Aspek geografis adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada tiap-tiap negara dengan konteks perpolitikan yang berbeda. Suatu wilayah tentu berbeda

kepentingannya, karena itulah setiap negara berusaha menghubungkan kekuasaan dengan potensi alam yang tersedia. Perbedaan geografis tentu berbeda kepentingan pula, maka agar suatu negara dapat mencapai kepentingannya dibutuhkan suatu strategi untuk memanfaatkan kondisi geografi dalam menentukan arah kebijakan untuk mencapai tujuan nasionalnya, walaupun dengan cara mengambil potensi dari negara lain. Begitupun dengan Iran. Iran berada di persimpangan Timur Tengah, Asia Barat, dan Kaukasus. Dimana bagian utara Iran adalah Armenia, Azerbaizan, Turkmenistan, di bagian timur bersebrangan dengan Afganistan dan Pakistan, di bagian barat berhimpitan dengan Irak dan Turki¹¹. Melihat kondisi geografis Iran memang sangat menguntungkan. Iran adalah negara yang kaya akan sumber energi. Iran adalah salah satu negara OPEC (*Organization of The Petroleum Exporting Countries*) yang mempunyai potensi minyak Khuzestan dan gas yang luar biasa di Pars Selatan. Maka tidak heran apabila negara-negara industri seperti Amerika mengincar Iran.

Kepentingan negara tidaklah jauh berbeda dengan negara lain sehingga dalam kaitan ini Amerika mempunyai kepentingan negaranya sendiri dalam membuat satu hegemoni ke timur tengah, menyebarkan azas-azas demokrasi ke semua negara. Bukan hanya itu kepentingan yang lebih penting dari Amerika bahkan dapat bekerjasama dengan Iran yaitu kepentingan mengenai nuklir, bukan hanya mengenai nuklir akan tetapi potensi besar di timur tengah yaitu sumber daya minyak yang sangat berlimpah sehingga tersebarnya minyak di timur tengah menjadi sangat menggiurkan bagi Amerika untuk dapat menguasai timur tengah, 1957 awal mula kerjasama Amerika Serikat dengan Iran mengenai pembahasan nuklir berlangsung sehingga Iran menerima bantuan Amerika namun dengan alih-alih Amerika Serikat yang menginginkan

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Iran>, diakses pada 12 April 2018

kerjasama, akan tetapi Iran sudah mengetahui akal bulus dari Amerika Serikat sehingga pada saat itu Iran dapat menguasai dan dapat menjalankan uji coba rudal yang menjadi suatu ancaman besar bagi Amerika yang mana dalam percobaan tersebut sangat mengenai sasaran uji.

Menjalankan suatu kepentingan Amerika Serikat di Iran tidaklah mudah karna masih banyak polemik yang terjadi, dengan kata lain Amerika masih mengusahakan kepentingannya di ranah timur tengah, menjalankan satu kebijakan Amerika dalam hal ekonomi dan demokrasisi menjadikan misi Amerika untuk bisa menjadi satu acuan penting dalam kepentingan negara Amerika tersebut.

Amerika Serikat tidak akan pernah diam terhadap pengembangan nuklir Iran yang saat ini terus di kembangkan dikarenakan iran membuat kekuatan nuklir yang dapat menghanguskan beberapa negara untuk menunjukkan bahwa iran sangatlah kuat dan teknologinya tidak dapat di bantahkan oleh negara manapun. Sebenarnya tujuan awal pengembangan nuklir Iran adalah untuk membuka pintu investasi Amerika Serikat dalam bidang industri nuklir sipil juga perawatan kesehatan¹². Pengembangan nuklir ini sangat didukung oleh Amerika Serikat berupa program atom dengan tujuan damai. Instalasi riset pertama Iran untuk riset nuklir yang berkekuatan lima megawatt sampai pada akhir perkembangannya Iran dapat mengembangkan nuklirnya sendiri. Pengembangan nuklir yang awalnya didukung sepenuhnya oleh Amerika telah menjadi sebuah ancaman baru bagi Amerika. Berawal pada bulan Juni 2004 Amerika Serikat Bersama Israel bersepakat menekan Iran agar membekukan aktivitas pengayaan uranium dengan melakukan langkah diplomatik mendesak

¹² [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/09/JURNAL%20ALDINO%20YOSHITOMO%20\(09-27-17-05-03-31\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/09/JURNAL%20ALDINO%20YOSHITOMO%20(09-27-17-05-03-31).pdf), diakses pada 12 April 2018

IAEA agar membawa Iran kepada Dewan Keamanan PBB¹³. Iran tidak terlalu menghiraukan ancaman yang diberikan Amerika dengan menggunakan organisasi internasional untuk menghentikannya.

Karena apabila ditinjau lebih jauh lagi, pengembangan nuklir Iran adalah untuk urusan dalam negerinya yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik juga untuk memperoleh kepercayaan masyarakat internasional mengenai perkembangan nuklirnya dengan tujuan damai, maka Iran menandatangani perjanjian NPT (*Non Poliferation Treaty*). Segala hal dilakukan Amerika untuk menghentikan program nuklir Iran, karena menganggap itu adalah sebuah ancaman yang besar bagi negaranya, terlebih lagi politik luar negeri Iran yang terkenal tegas, cerdas, dan realistis dalam menanggapi hegemoni barat. Iran yang anti barat ini terus melakukan revolusi yang mempunyai kebijakan bertentangan dengan barat merupakan faktor yang menguatkan posisi Iran. Popularitas Iran di Kawasan Timur tengah meningkat dengan menunjukkan kepedulian terhadap negara-negara yang sedang mengalami kekacauan seperti ;Libanon,Libya dll. Maka apabila revolusi Iran terus berkembang, hal ini akan membuat dominasi AS ditimur tengah menjadi terancam sebelum mencapai kepentingannya.

B. Strategi Amerika Serikat dalam menjalankan kepentingannya di Iran

Melihat bagaimana perkembangan nuklir di Iran yang meningkat secara signifikan membuat Amerika Serikat semakin khawatir akan terancamnya keamanan nasional Amerika Serikat sehingga Amerika menjalankan berbagai cara untuk menghalau perkembangan nuklir di Iran dengan mengeluarkan kebijakan luar negerinya di Iran. Namun dalam menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki karakteristik bergantung pada Presiden dari

¹³ <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25382.pdf>, diakses 13 April 2018

partai mana yang berkuasa. Presiden sebagai eksekutif bertanggung jawab dalam membuat kebijakan luar negeri sesuai persetujuan kongres sebagai perwakilan rakyat dan Partai Politik. Masing-masing Partai Politik memiliki karakteristik sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kepentingan nasional. Karakter isolasionisme dipakai saat pemerintahan awal Amerika Serikat untuk melindungi dalam negeri dari konflik yang berkepanjangan di Eropa dan dunia. Realisme sebagai karakter Partai Republik yang menggunakan *hard power* sebagai alat mencapai kepentingan nasional, sedangkan pragmatisme adalah karakter Partai Demokrat yang senantiasa mencari keuntungan dengan bersikap terbuka menggunakan *soft power* menggunakan perundingan dan negosiasi. Dalam hal ini Amerika menjalankan dua langkah dalam menghadapi perkembangan nuklir di Iran yaitu melalui *hard power* yang identic dengan kemananan militer dan *soft power* yang identic dengan negosiasi dan kerjasama.

Pada masa perang dingin, Iran telah melakukan dialog dengan Uni Soviet dalam hal pengembangan nuklir mengenai penyelesaian reactor Buser yang sebelumnya terkendala penyelesaiannya. Uni soviet menawarkan kebutuhan peralatan pengembangan nuklir untuk reactor Buser dengan tujuan untuk menjadikan nuklir di Iran sebagai energy alternative pembangkit listrik di Iran yang memang sangat mendesak. Namun hingga pada tahun 1955 dimana Uni soviet terpecah menjadi Rusia reactor Buser tersebut belum juga selesai sehingga Rusia menawarkan untuk menyelesaikan reactor Buser dan mengajukan untuk membangun 3 reaktor nuklir di tempat yang sama dengan lokasi reactor Buser. Perjanjian proliferasi nuklir Iran-Russia mendapat reaksi keras dari Amerika. Respon yang di berikan Amerika berupa penentangan dan penolakan dikarenakan Amerika khawatir jika proliferasi ini akan ditujukan untuk membuat senjata pemusnah massal.

Dengan adanya respon keras dari Amerika tidak membuat Iran gentar, justru Iran semakin meningkatkan kerjasama dalam pengembangan nuklirnya dengan menjalin kerjasama dengan negara negara lain seperti menjalin kerjasama perjanjian Iran-China yang berisi kerjasama untuk membangun reaktor produksi plutonium, dua reaktor dan fasilitas konversi uranium. Kemudian perjanjian Iran-Argentina yang berisi kerjasama dalam hal pengayaan uranium dan produksi air berat. Kemudian perjanjian Iran-Russia yang berisi kerjasama pembangunan reactor air berat.

Melihat hal tersebut Amerika merespon dengan mengajak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi bagi Iran. Bill Clinton selaku Presiden Amerika pada saat itu menginstruksikan embargo perdagangan dan melarang para investor Amerika untuk menginvestasikan uangnya di Iran. Administrasi Bill Clinton mengklaim kebijakan ini dapat menekan perkembangan investasi di Iran dan mencegah Iran dalam mensupport teroris internasional dan mengentikan pembuatan senjata pemusnah massal¹⁴.

Pada masa pemerintahan George W. Bush keamanan semakin ditingkatkan dalam menghadapi nuklir Iran terlebih Pasca terjadinya tragedi 9/11 yang merupakan peristiwa pengeboman World Trade Center Presiden Bush semakin menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin negara adidaya dengan menerapkan doktrin *pre-emptive strike*, yakni melakukan penyerangan terhadap musuh sebelum musuh melakukan ancaman dan mengambil tindakan lebih¹⁵. Amerika Serikat lalu secara spontan mengkampanyekan kebijakan *war on terrorism* nya keseluruh dunia dan khususnya timur tengah. Irak, Iran dan

¹⁴

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16023/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. diakses pada 13 April 2018

¹⁵<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15466/k.%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=11&isAllowed=y>. diakses pada 13 april 2018

Afganistan lalu dituduh sebagai negara yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris yang diklaim oleh Amerika Serikat bersalah atas serangan tersebut. *Axis of evil*, merupakan sebuah ungkapan atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara dengan kecenderungan tindakan agresif (*threatening*) atau kecenderungan untuk melakukan perlawanan (*bellicose*). Negara yang pernah dirujuk sebagai *axis of evil* antara lain ialah Cuba, Sudan, Syria, Iran, Korea Utara, dan Irak.¹⁶

Amerika Serikat beranggapan bahwa negara-negara yang dicurigai memberikan bantuan atau dukungan kepada teroris tidak jauh berbeda dengan teroris itu sendiri. Diantara negara-negara yang diklasifikasikan kedalam *Axis of Evil* adalah Iran. Dan semakin meyakini bahwa program nuklir Iran merupakan suatu ancaman bagi keamanan nasional Amerika dan kemananan Internasional yang akan mengganggu perdamaian dunia.

Pemerintahan Amerika berpendapat bahwa Iran berusaha untuk mendapatkan senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, yang dapat mengancam AS dan sekutu-sekutunya. Bahkan Presiden Amerika pada saat itu mengatakan bahwa Iran secara agresif telah mengejar pembuatan senjata (pemusnah massal) dan mengeksport teror, sementara beberapa pihak menekan harapan rakyat Iran akan kebebasan. Sehingga dalam pandangan politik luar negerinya Amerika Serikat memiliki pandangan juga bahwa dengan dibiarkannya Iran melanjutkan program nuklirnya maka negara-negara lain di kawasan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Mesir, Suriah, dan Turki akan mengikuti langkah Iran sehingga dikhawatirkan akan timbul perlombaan senjata, Iran dapat memanipulasi harga minyak dan dapat meningkatnya teroris

¹⁶ [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/09/JURNAL%20ALDINO%20YOSHITOMO%20\(09-27-17-05-03-31\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/09/JURNAL%20ALDINO%20YOSHITOMO%20(09-27-17-05-03-31).pdf).
Diakses pada 13 April 2018

dengan target utama adalah Amerika Serikat, Israel dan negara-negara di Eropa.¹⁷

Dalam menghadapi nuklir Iran George Bush menggunakan *hard power* dengan mengancam akan menyerang Iran dengan kekuatan militer jika Iran tidak mau menghentikan pengembangan nuklirnya. Amerika juga berusaha mengajak negara-negara eropa dan PBB untuk memberikan sanksi yang lebih ketat kepada Iran. Dengan Hal ini membuat Iran dijatuhi berbagai resolusi sanksi dari Dewan Kemananan PBB yang dimotori oleh Amerika Serikat. Terhitung dari tahun 2006 hingga 2008, Iran telah dikenakan sebanyak 4 resolusi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aktifitas nuklirnya sementara, dan juga dalam bentuk sanksi ekonomi. Disamping itu Bush juga meletakkan beberapa pangkalan militernya di Timur Tengah untuk menjaga keamanannya.

Berbeda dengan Bush, pada masa pemerintahan Barack Obama dalam menghadapi nuklir Iran lebih mengedepankan *soft power* dengan lebih mengedepankan diplomasi mengajak kerjasama Iran. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki karakteristik bergantung pada Presiden dari partai mana yang berkuasa. Presiden sebagai eksekutif bertanggung jawab dalam membuat kebijakan luar negeri sesuai persetujuan kongres sebagai perwakilan rakyat dan Partai Politik. Dalam hal ini Obama selaku Presiden yang berasal dari Partai Demokrat tentu saja lebih mengedepankan soft power dibandingkan dengan hard power.

Pada tanggal 14 juli 2015 presiden Obama mengumumkan bahwa kesepakatan nuklir Iran telah berhasil dicapai melalui diplomasi dengan beberapa poin yang membatasi kemungkinan pengembangan senjata nuklir Iran

¹⁷ Ibid.

sementara mengizinkan negara tersebut untuk terus menjalankan program nuklir sipil mereka, dan mengurangi jumlah sentrifugal canggih Teheran. Kesepakatan ini juga membahas embargo PBB tentang senjata-senjata konvensional, yang Iran, dengan dukungan Rusia, ingin agar dihapus. Kesepakatan ini akan tetap memberlakukan embargo senjata selama lima tahun dan embargo misil selama delapan tahun, tapi bisa berakhir lebih cepat bila IAEA memutuskan Iran telah mencapai sasaran kesepakatan yaitu menghentikan semua kegiatan untuk mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang berkali-kali dibantah oleh Teheran.

Kesepakatan yang dicapai hari itu mewakili kompromi bersejarah setelah kebuntuan selama 12 tahun, yang kadang-kadang, mengancam timbulnya konflik baru di Timur Tengah. Kesepakatan ini akan diterapkan setelah mengatasi hambatan-hambatan di Washington dan juga Teheran. Pihak konservatif di kedua ibukota tersebut telah menentang kompromi yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Smart power yang diajukan oleh Amerika Serikat dalam menghadapi konflik nuklir Iran merupakan jalan keluar terbaik.

KESIMPULAN

Iran merupakan salah satu Negara yang mengembangkan energi nuklir secara besar-besaran yang justru menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat internasional terutama Negara-negara barat, salah satunya adalah Amerika Serikat yang menentang adanya perkembangan nuklir di Iran yang dapat menyebabkan terhalangnya kepentingan-kepentingan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah dalam menguasai minyak bumi dan gas alam, juga menghalau kekuatan Iran yang

akan menghambat hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika Serikat dalam menjalankan kepentingannya meyakini bahwa pengembangan nuklir di Iran bertujuan untuk membuat tenaga pemusnah massal atau WMD (*weapon of mass destruction*), Sehingga Amerika Serikat mengeluarkan beberapa strategi untuk menghadapi perkembangan energi nuklir di Iran baik secara hard power maupun soft power. Diantaranya berupa beberapa kebijakan baik yang bersifat militeristik maupun diplomasi yang meliputi penerapan sanksi dan pembatasan yang lebih ketat, mendorong terjadinya perubahan rezim dan invasi militer, dan negosiasi besar-besaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baylis, John & dkk. 2002. *Strategy in the Contemporary World*. Oxford University Press
- Mochtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. 1990 Jakarta: LP3ES
- Winarno. Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.

Internet dan artikel online

- Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Program, part I: it's history", *Payvand Iran News*, diakses dari <http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html>
- Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Program, part II: Are Nuclear Reactor Necessary?", *Payvand Iran News*, diakses dari <http://www.payvand.com/news/03/oct/1022.html>
- Dina Sulaeman Y. 2009. *Obama Revealed: Realitas di Balik Pencitraan*. Bandung.
- Aji Pratama Tije, *Kebijakan Nuklir Iran dalam Menghadapi Respon Barat Pada Masa Pemerintahan Presiden Mahmud Ahmadinejad 2005-2007*, diambil dari

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/118799-T%2025107%20-%20Kebijakan%20nuklir-Analisis.pdf>

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140922155915-120-3985/10-fakta-mengenai-nuklir-iran/>

Larasati, Meutia. *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Iran Pada Masa Pemerintahan George walker Bush dan Barrack Hussein Obama*. Universitas Gajah Mada 2015. diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=77993

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37137641/PGAS.docx?response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DPolitik+Global+Amerika+Serikat.docx&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190820%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190820T181400Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ce7e00320a1bb733dd2bf6de60fd7d338c769a4f9190e427b32fc2e411e1f073, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 2.37

<https://ic-mes.org/politics/irak-dan-kebijakan-luar-negeri-as-di-timur-tengah/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 3.01